

TAJUK RENCANA

Meratakan Distribusi Daging Kurban

HARI Raya Idul Adha akan segera tiba. Saat umat Islam bersuka-suka menikmati hidangan aneka masakan daging, baik daging sapi, kambing, atau unta kalau di negara-negara Arab.

Namun kenyataan, untuk tahun ini sedang ada masalah besar terkait hewan ternak yang biasa untuk kurban, yaitu menyebarkan penyakit mulut dan kaki (PMK) pada sapi. Padahal salah satu syarat sahnya hewan ternak untuk kurban adalah sehat dan tidak cacat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Imam Tirmidzi, Abu Dawud Dari al-Barra bin Azib ra menyebutkan, ada empat macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, yaitu yang matanya buta, fisiknya jelas sakit, kakinya pincang dan yang badannya kurus berlemak.

Karena itu, menjadi kewajiban pihak-pihak terkait untuk memastikan hewan ternak yang akan dikurbankan umat Islam benar-benar sehat. Pemeriksaan terhadap ternak yang dijual perlu diintensifkan, apalagi yang didatangkan dari luar daerah. Lebih khusus lagi, jajaran aparat pemerintah perlu mengecek hewan-hewan yang akan disembelih untuk kurban.

Lebih dari itu, sebenarnya masih ada masalah terkait umat Islam yang melaksanakan kurban maupun distribusi dagingnya. Ada ketimpangan antara kota dengan desa, apalagi dengan daerah pegunungan. Untuk di wilayah perkotaan, jumlah umat Islam yang berkorban relatif cukup banyak, bahkan sampai sering surplus daging kurban. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya kebanyakan sudah biasa mengkonsumsi masakan daging, karena umumnya orang mampu.

Sedangkan di desa, atau pegunungan, jumlah yang kurban sering minim, bahkan kadang ada yang nihil. Otomatis daging yang didis-

tribusikan hanya sedikit, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Sementara dalam kehidupan sehari-hari mereka jarang sekali mengkonsumsi masakan daging.

Karena itu, alangkah baiknya kalau sejak awal kita sudah mulai memikirkan bagaimana agar distribusi daging kurban pada Idul Adha nanti bisa merata. Pada hari raya nanti betul-betul semua bisa berbahagia. Dalam hal ini, masjid-masjid yang jumlah hewan kurbannya melimpah, sebagian bisa disalurkan ke daerah yang kekurangan. Untuk merealisasikan semua itu sebenarnya tidak sulit. Bisa dilakukan sendiri oleh panitia kurban di masjid/instansi untuk kegiatan bakti sosial. Bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga filantropi yang ada dan mempunyai jaringan luas di masyarakat, misalnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan begitu, distribusi daging kurban bisa merata, sehingga semua bisa berbahagia. Tidak ada kelompok masyarakat yang sampai menumpuk banyak daging kurban sedang di sisi lain ada warga yang sama sekali tidak bisa menikmati daging.

Untuk itu memang diperlukan kesadaran bagi shohibul qurban bahwa hewan kurban yang disembelih daging tidak untuk warga sekitar. Apalagi memang tidak ada ketentuan daging kurban didistribusikan untuk warga sekitar, tetapi bisa untuk warga masyarakat yang lebih luas. Yang penting, daging didistribusikan untuk kalangan fakir dan miskin. Bahkan rasanya lebih manfaat kalau bisa dinikmati mereka yang jarang makan masakan daging.

Kiranya, bagi yang diprediksi akan surplus hewan/daging kurban, masih ada waktu untuk merencanakan pendistribusian daging kurban secara lebih luas dan lebih tepat sasaran. □

Pilpres Era Pasca-kebenaran

SEJAK Pilpres 2019 masyarakat Indonesia terbelah dalam dua kubu, membela dan mendukung masing-masing kandidat saat itu. Walaupun kandidat yang tidak terpilih sudah bergabung dalam Kabinet, fragmentasi masyarakat masih berlanjut. Setidak-tidaknya di media-sosial, kedua belah pihak saling mempertahankan kebenaran pendapatnya. Padahal para elite lokal sudah berkolaborasi dalam arena Pilkada berikutnya.

Kerukunan elite nasional maupun lokal, seolah tidak mampu merekatkan fragmentasi itu. Perilaku elit seolah tidak bisa meredakan perseteruan masyarakat. 'Kebenaran' seolah tak lagi dapat hadir di antara mereka. Tulisan ini dibuat untuk menjawab: Apakah pembenaran pendapat mereka melalui media sosial akan memperparah fragmentasi pada Pilpres 2024?

Campur Aduk

Memang tidak semua warganegara mempunyai sarana untuk ikut dalam media sosial. Tetapi boleh dikatakan, mayoritas masyarakat kita sudah terbiasa mendengar (terkena dengung) media sosial termasuk mereka yang tak memiliki sarana. Revolusi Industri 4.0 benar-benar telah mempengaruhi, langsung maupun tidak langsung, masyarakat kita secara luas. Sehingga kebenaran (maupun ketidakbenaran) campur aduk sedemikian rupa.

Gema kampanye Pilpres 2019 yang membelah kita sedemikian rupa, masih melekat dampak buruknya hingga sekarang. Tidak sedikit grup WA terbelah dan bubar karena kuatnya pembenaran masing-masing pihak. Bahkan banyak hubungan keluarga yang menjadi renggang karena serupa. Padahal Prabowo dan Sandiaga Uno sudah sejak lama bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dengan baik-baik saja.

Para elite di partai-partai yang bertanding sudah berkolaborasi diberbagai

Tulus Warsito

daerah pilkada. PDIP+PKS bersatu di 33 pilkada (3 provinsi, 23 kabupaten dan 6 kota). PDIP+Gerindra berkoalisi di 48 daerah (5 provinsi, 37 kabupaten dan 6 kota). Sedangkan PKS+Gerindra berkolaborasi di 21 daerah (2 provinsi, 16 kabupaten dan 3 kota). Bagaimana pun jumlah itu adalah bukan jumlah yang sedikit. Namun demikian fragmentasi masyarakat masih terasa kental. Perilaku



KR-JOKO SANTOSO

saling nyinyir dianggap sebagai santapan sehari-hari.

Sebagian pihak menganggap keadaan ini sebagai bunga-bunga demokrasi saja. Tetapi lihatlah ketika pendengung salah satu pihak babak belur digebuki, susah bagi kita menemukan bunga-bunga demokrasi itu. Lalu apa yang bisa kita perbuat?

Meredam Gejolak

Kalau para elite, yang dulunya dianggap memiliki kemampuan meredam gejolak masyarakat, sekarang nyatanya tidak. Lalu kepada siapa kita harus bertabayun (meneliti, cek dan ricek) ter-

hadap 'kebenaran' yang kita yakini sebagai 'benar'?

Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan panggung komunikasi baru dengan data raksasa. Walaupun seolah menyediakan data bagi siapa saja, tetapi data itu hanya sebatas narasi saja, tidak dijamin benar tidaknya. Data yang benar dengan data yang benar-benar tidak benar, semua ada di keranjang Big Data itu. Dalam kenyataan di lapangan, persepsi (atau mispersepsi) sama-sama menjadi motivasi untuk melakukan suatu tindakan. Artinya, baik yang punya persepsi positif terhadap penampilan calon presiden maupun yang salah persepsi kepada calon tersebut, bisa jadi mencoblos calon yang sama.

Koran tanpa redaksi, medsos pada umumnya, semuanya menyerbu kalbu kita. Berupaya menyampaikan bahwa pesan mereka adalah benar adanya. Tim Sukses maupun Relawan tak ada bedanya dalam hal manipulasi kebenaran pesannya. Ada yang menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah rekayasa. Tidak sedikit yang tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah keliru.

Kalau kita percaya bahwa dalam politik tidak ada lawan maupun kawan yang abadi, seharusnya fragmentasi itu segera berakhir. Ternyata kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap kebenaran yang kita yakini sendiri. □

*) Prof Dr Tulus Warsito, Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Jago-jago Capres Mulai 'Kluruk'

IBARAT macan buas, partai politik terus berlari. Demi meraih kekuasaan, gerak cepat jadi kata kunci. Meskipun pilpres masih dua tahun lagi tapi mesin parpol sudah dipanasi. Beberapa jago atau tokoh sudah diluncurkan lewat deklarasi. Ramai dan riuh. Jago-jago dalam pencapresan mulai kluruk. Gimnick politik pun muncul demi memanas suasana untuk promosi diri atau memikat publik.

Demokrasi liberal percaya bahwa hak politik rakyat bisa terpenuhi melalui pemilihan langsung. Padahal sejatinya rakyat tak bisa memilih capres/cawapres karena parpol lah yang menentukan pilihan. Celakanya pilihan parpol tidak selalu sesuai dengan pilihan rakyat. Ini diperparah dengan aturan batasan 20% sebagai syarat bagi parpol untuk mencalonkan seseorang maju dalam kontes. Akhirnya, jumlah calon sangat terbatas: dua atau tiga pasangan. Potensi-potensi anak bangsa yang lain pun terkubur. Ini yang disebut elitisasi pilpres.

Transformasi Watak

Kultur politik Indonesia telah mengalami transformasi watak atau karakter dari penguatamaan kepentingan ideologis dan kepentingan rakyat (era Orde Lama) ke pragmatisme (Orde Baru sampai Reformasi). Pada masa Orde Lama ada banyak aliran politik dan parpol. Minimal dikenal tiga arus besar: nasionalisme (antara lain PNI), agama (Masyumi, NU), sosialisme (PSI) dan komunisme (PKI).

Pada masa Orde Baru terjadi aksentuasi kepentingan. Ekonomi dan pembangunan material dijadikan panglima. Untuk itu dibutuhkan stabilitas dan demokrasi pun dikorbankan. Parpol disederhanakan menjadi tiga: PPP, Golkar dan PDI, di mana Golkar selalu menang. Massa pun dibikin mengam-

Indra Tranggono

bang. Pada masa Reformasi terjadi ledakan demokrasi. Muncul banyak parpol. Namun jumlah partai peserta pemilu makin sedikit. Banyak parpol gagal menembus ambang batas elektoral.

Ketika terjadi Reformasi, rakyat berharap demokrasi bisa membawa masyarakat pada penguatan civil society. Namun reformasi berubah haluan dan dibelokkan kekuatan politik dan ekonomi menjadi penguat bagi kaum elite. Banyak analisis politik menengarai parpol telah 'membajak' reformasi. Selanjutnya terjadi amandemen UUD 45 yang lebih memberi kelonggaran bagi kapitalisme dan liberalisme ekonomi dan politik. Lalu muncul oligarki hingga kini.

Dinamika politik pun semakin mengristal. Dikendalikan para bos politik, partai-partai besar menjadi penentu arah demokrasi, termasuk pemilu legislatif, pilkada dan pilpres. Demokrasi berlangsung secara prosedural dengan langgam transaksional. Modal ekonomi lebih diutamakan daripada modal kultural dan ideologis.

Dalam demokrasi transaksional, parpol-parpol besar dan menengah yang diuntungkan secara material. Ini terkait dengan para bebotoh bermodal besar yang terjun ke politik dengan tujuan mendapatkan akses ekonomi. Kelak jika tokoh yang didukungnya menang, banyak proyek mengalir pada mereka.

Produk Buram

Politik berbasis uang dan traksaksi merupakan produk buram demokrasi. Demokrasi menjelma jadi drama di tengah pasar politik. Tak ada nilai-nilai substansial dan ideologis. Yang

penting pesta demokrasi dilaksanakan dan muncul seorang presiden terpilih. Soal kualitas hasil pilpres, dianggap 'tidak terlalu' signifikan. Karena siapa pun yang jadi presiden tak otomatis jadi penentu penyelenggaraan negara. Di balik praktik pemerintahan ada sejumlah orang penting yang jauh lebih otoritatif daripada presiden. Di sini oligarki yang menentukan.

Menjadi tragedi besar bagi bangsa jika pilpres tak mampu melahirkan seorang presiden yang mampu menjadi pendekar konstitusi. Lebih menyedihkan jika yang berkuasa adalah kawan serigala oligarki. Kedaulatan tak lagi di tangan rakyat, tapi ada di saku kelompok elite penguasa politik dan ekonomi. Mustahil mereka akan memerjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Elite politik dan ekonomi semakin hidup makmur sentosa. Sementara rakyat tetap hidup tersaruk-saruk di cakrawala kemiskinan dan penderitaan. □

*) Indra Tranggono, praktisi budaya dan esais

Pojok KR

- Akhirnya, Jokowi reshuffle kabinet.
- Harus banyak manfaat untuk rakyat.
- ***
- Naik motor, jangan pakai sandal jepit.
- Intinya, aman saat berkendara.
- ***
- Aturan zona 300m munculkan kekhawatiran.
- Sesuai harapan Sultan, jangan 'saklek'.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Menunggu Janji Harga Migor Turun

SELAMAT untuk para menteri baru, yang dilantik Presiden Jokowi Rabu lalu. Yang menarik kami rakyat kecil bukan dari partai manapun, adalah janji Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dari PAN. Tentu kami rakyat tidak pernah berpikir dari partai manapun, namun janji untuk menuntaskan masalah minyak goreng kami tunggu. Bahkan Presiden, sangat berharap Menteri Perdagangan yang baru akan mampu mengatasi masalah tersebut dengan baik.

Rasanya seperti angin segar, men-

dengar hal tersebut. Selama ini pemerintah sudah tidak mampu untuk menurunkan harga minyak goreng. Saya juga heran, kok bisa demikian. Maka benar kata para demonstran di Jakarta, bahwa harga minyak goreng memang stabil, maksudnya stabil mahal. Karena ini lewat Kedaulatan Rakyat, kami berharap agar janji Pak Menteri untuk mengatasi (menurunkan) harga minyak goreng dapat terlaksana. Kami menunggu realisasi janji bapak Menteri. □

Ny Ani Sunarto, Gorongan, Condongcatur, Depok, Sleman.

Jaga Kesehatan Para Calhaj

SAAT ini rombongan para calon haji DIY mulai berangkat menuju tanah suci. Menarik, imbauan bapak H Sukirman dari BPH KBIH Aisyiah Yogyakarta. Agar para calon haji tidak tersibuk pada seremonial menjelang keberangkatan menunaikan ibadah ke tanah suci. Saat ini, masyarakat masih mengalami tradisi demikian menjelang keberangkatan.

Pada hal yang perlu diperhatikan, justru harus banyak membatasi kerumunan. Covid-19 belum berakhir, se-

hingga dikawatirkan calon jemaah haji bisa tertular jika ada yang tak seenggaja menderita, sebab jika positif Covid-19 bisa gagal berangkat. Selain juga kecapakan, dapat menyebabkan kesehatan kurang prima. Mudah-mudahan imbauan tersebut bisa menjadi catatan.

Sugeng tindak para tamu Allah di tanah suci, mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Tetap jaga Kesehatan. □

Harjana SH, Pirak Mertosutan, Godean, Sleman.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujijanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Kedaulatan Rakyat

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)